



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

KPU
Melayani
www.gorontalo.kpu.go.id

SUARA KPU

Edisi Maret - April 2018

Gerakan
**Sadar
PEMILU**



17
April 2019



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Maspa Mantulangi , M.Pd.I

REDAKTUR

Drs. Ardin Danial.MEcDev

EDITOR

Aniki Suleman, S.Sos.,M.Si

REDAKSI

Hendrawati Saliko,SH,.MM

Sjukri Hala,SH

Ramin Hunou

Fahrudin Umar,S.Kom

LAYOUT

Farid Gaff

Duti

FOTO GRAFER

Moh. Rhonal Makuta, SH

Rifat Yusuf, A.Md

Rahmat



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

Jln Tinaloga Kec Tilongkabila
Provinsi Gorontalo



Aniki Suleman, S.Sos.,M.Si

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak Rahmat-Nya sehingga dapat terselesainya jurnal SUARA KPU Edisi ke-2. Didalam Jurnal ini, kami menyajikan informasi program kegiatan pelaksanaan Pemilu 2019, dengan Narasumber oleh Komisioner KPU Provinsi Gorontalo yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 24 Mei 2018, (Periode 2013-2018).

Meskipun demikian, jurnal SUARA KPU secara berkesinambungan akan terus kami sajikan dengan narasumber Komisioner yang baru Periode 2018-2023.

Pemberitaan melalui jurnal ini, adalah sebagai salah satu wujud transparansi KPU, dalam pelayanan publik khususnya informasi seputar Pemilu 2019. Atas kepercayaan yang terbangun, kami berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai bagian yang membidangi Hukum, Teknis dan Hupmas, kami juga berharap lewat Jurnal Suara KPU dapat membantu masyarakat mengetahui program dan tahapan Pemilu 2019 yang sementara berjalan.

Media ini salah satu sarana publikasi yang kami sajikan, selain bisa mengakses langsung Informasi lewat laman webiste KPU Provinsi Gorontalo di <http://gorontalo.kpu.go.id/>.

Terima Kasih.

PEMILIH PADA PEMILU 2019 WAJIB PUNYA KTP-EL

Undang-undang Nomor 7/2017, Pasal 38 UU tentang Pemilihan Umum

Menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden 2019, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terus memvalidasi data pemilih sebagaimana regulasi yang telah dikeluarkan yaitu Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data menegaskan bahwa, untuk Pemilu 2019 mendatang pemilih wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan.

"Saat ini pemilih yang didata berbasis KTP-e dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kabupaten/kota," kata Verrianto Macjowa, pada acara sosialisasi PKPU nomor 11 tahun 2018, yang dihadiri oleh KPU, Disdukcapil Provinsi, kabupaten/kota, perwakilan dan partai politik.

Untuk itu pihaknya berharap agar KPU kabupaten/kota terus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil setempat, untuk perbaikan data pemilih, dengan harapan semua pemilih di Gorontalo sudah melakukan perekaman KTP-e.

Ia menegaskan bahwa, sepanjang pemilih itu tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan dari Disdukcapil maka dia tidak bisa memilih.

"Ini kondisi regulasi saat ini, apakah akan ada perubahan atau tidak terkait pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, kami belum tahu," ujarnya.

Saat ini KPU masih melakukan pencocokan dan penelitian atau "Coklit" di lapangan, untuk memvalidasi data pemilih mulai tanggal 17 April - 17 Mei 2018, dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Sementara.

Namun coklit hanya dilakukan untuk Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Boalemo dan kabupaten Pohuwato, sementara untuk Kabupaten Gorontalo Utara dan Kota Gorontalo, tidak dilakukan coklit.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan pada saat Pemilu pada 2018 tahun ini dijadikan sebagai DPS untuk Pemilu 2019.

Terkait pengecekan daftar pemilih apakah sudah masuk sebagai pemilih atau tidak, Verrianto mengatakan seluruh data terpusat di KPU RI, dimana masyarakat bisa mengecek langsung lewat website <http://intopemilu.kpu.go.id/>.

"Apabila setelah dilakukan pengecekan dan tidak muncul namanya di sistem ini, dapat memberitahukan kepada PPS terdekat," ujarnya.



KPU PASTIKAN JAGA KERAHASIAAN NIK DAN NKK PEMILIH

| KABUPATEN/KOTA | Wajib KTP-el | Sudah MEREKAM | BELUM MEREKAM |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Kab. Boalemo | 103,345 | 97,403 | 5,942 |
| Kab. Bone Bolango | 113,497 | 110,907 | 2,590 |
| Kab. Gorontalo | 284,381 | 259,728 | 24,653 |
| Kab. Gorontalo Utara | 91,437 | 87,737 | 3,700 |
| Kab. Pohuwato | 99,499 | 97,820 | 1,679 |
| Kota Gorontalo | 139,069 | 134,795 | 4,274 |
| Total | 831,228 | 788,390 | 42,838 |

Terkait dengan berita akan penyalahgunaan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK), dimana saat ini penggunaan nomor SIM Card seluler yang harus melakukan registrasi sebelum digunakan, anggota KPU Provinsi Gorontalo Verrianto Madjowa menegaskan bahwa KPU dipastikan menjaga kerahasiaan NIK dan NKK penduduk.

Menurutnya bahwa, pada Pilkada 2018 ini memang masyarakat sudah bisa melakukan pengecekan data apakah dia sudah terdaftar dicalam DPT atau tidak, namun KPU dalam hal ini menampilkan data pada website KPU, menyembunyikan 4 digit angka terakhir yang tertera pada NIK dan NKK.

"Tanggal 13 maret 2018, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan surat ke KPU RI, bahwa NIK dan NKK untuk tidak ditampilkan secara utuh," kata Verrianto Madjowa.

Ia menambahkan bahwa terkait dengan hal itu KPU RI kemudian monidakanjntu dengan mengo uarkan surat edaeran ke KPU Provinsi dan kabupaten/kota bahwa Daftar Pemilih Sementara (DPS) atau DPT yang ditampilkan adalah dengan menghilangkan 4 digit angka terakhir yang ada pada NIK dan NKK.

Menurutnya bahwa, hal ini juga sesuai dengan Peraturan KPU nomor 11 tahun 2018, dimana jelas didalam pasal 27 disebutkan bahwa,

"KPU Kabupaten/Kota capat memberikan salnan DPS dalam bentuk softcopy dengan format excel atau Comma Separated Values (CSV) dari Sidalih, apabila terdapat permintaan resmi dari Peserta Pemilu tingkat daerah kabupaten/kota dan Bawaslu Kabupater/Kota".

"Namun Salinan DPS-IP yang diberikan tidak menampilkan informasi NK dan NKK pemilih secara utuh, dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud disertai dengan berita acara," tegas Madjowa.

Perkembangan Perekaman KTP-el Di Provinsi Gorontalo Terhitung Sampai Tanggal 31 April 2018

| KABUPATEN/ KOTA | WAJIB KTP-el | SUDAH MEREKAM | BELUM MEREKAM |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| Kab. Boalemo | 103,345 | 97,403 | 5,942 |
| Kab. Bone Bolango | 113,497 | 110,907 | 2,590 |
| Kab. Gorontalo | 284,381 | 259,728 | 24,653 |
| Kab. Gorontalo Utara | 91,437 | 87,737 | 3,700 |
| Kab. Pohuwato | 99,499 | 97,820 | 1,679 |
| Kota Gorontalo | 139,069 | 134,795 | 4,274 |
| Total | 831,228 | 788,390 | 42,838 |

PEMILIH LUAR DAERAH HANYA BISA MEMILIH PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Anggota KPU Provinsi Gorontalo Verrianto Madjowa yang membidangi Divisi Perencanaan dan Data mengatakan bahwa, pemilih yang memiliki KTP elektronik luar daerah artinya tidak sesuai dengan tempat tinggal disaat hari H pemungutan suara Pemilu 2019, maka pemilih tersebut hanya bisa memilih calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sepanjang memiliki surat pindah memilih.

"Saat hari H pemungutan suara, pemilih dari luar daerah dan tidak mengurus surat pindah memilih, maka dia tidak bisa memilih Capres/-Cawapres, anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi serta kabupaten/kota di daerah tersebut," kata Verrianto Madjowa.

Kecuali pemilih tersebut mengurus surat pindah TPS, maka dia boleh mendapat surat suara untuk memilih anggota legislatif sesuai tempat dimana dia akan pindah, seperti contoh pasien di rumah sakit, PNS atau pekerja luar daerah yang memilih pindah.

Ia menambahkan bahwa, pada Pemilu 2019 ini, data pemilih sudah berbasis alamat KTP-el.

"Ada perbedaan cara pendataan pada pemilu 2014 dengan Pemilu 2019 mendatang ini, kalau dulu kita mendata pemilih sesuai dimana dia tinggal, dan bisa jadi pemilih di tempat tersebut, namun untuk Pemilu 2019 sudah berbeda," urainya.

Namun demikian lanjut Verrianto Madjowa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarli) saat melakukan ceklit di lapangan tetap akan mencatat pemilih yang KTP-el nya beralamatkan diluar daerah, dalam formulir khusus.

Hal ini dimaksud untuk keperluan estimasi surat suara di lokasi tersebut, misalnya pekerja atau pelajar dari luar daerah. Dengan begitu KPU sudah ada data pemilih dari luar Gorontalo, yang KTP-el nya dari luar daerah dan dia ada di Gorontalo.

"Karena ada juga yang sudah tinggal di Gorontalo namun belum mengurus surat pindah dari Discukcapil daerah asal, maka mereka tetap memilih sesuai alamat pada KTP-el tersebut, kecuali dia sudah mengurus surat pindah," tambahnya.

Ia berharap bagi pemilih yang akan pindah TPS antar daerah harus mengurus surat pemberitahuan pindah TPS, agar data pemilih tersebut dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTa) di TPS tujuan.

Caranya sangat mudah, pemilih cukup menunjukkan KTP-el dan salinan bukti Form model A5 atau surat yang menunjukan bahwa dirinya telah terdaftar di TPS asal, kemudian ada form yang harus diisi dimana dirinya akan pindah memilih.

KPU TERIMA BERKAS DUKUNGAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPD RI

Sedikitnya ada sekitar 35 orang telah menyerahkan dukungan KTP, sebagai salah satu syarat pencalonan anggota DPD RI untuk wakil Provinsi Gorontalo.

Penjabat ketua KPU Provinsi Gorontalo Maspas Mantulangi mengatakan bahwa, 35 orang bakal calon anggota DPD tersebut, jika dilihat jumlah dan sebaran dukungan sudah memenuhi syarat.

"Jumlah dukungan yang dipersyaratkan hanya 1.000 orang, dan sebarannya minimal mencakup tiga daerah dari total ada enam kabupaten/kota di Gorontalo," kata Maspas Mantulangi.

Hingga batas terakhir pemasukan jumlah minimal dukungan, tanggal 26 April pukul 24.00 wita, total 35 orang yang menyerahkan, dari 37 orang yang mengambil "user name" untuk penginputan data secara on-line pada aplikasi Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP).

Sehingga secara otomatis dua orang yang tidak menginput data ke SIPPP, dinyatakan tidak bisa ikut dalam pencalonan DPD RI Pemilu 2019.

"Namun perlu ditegaskan bahwa dukungan KTP dari 35 bakal calon tersebut, KPU masih akan melakukan verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda," tegasnya.

Didalam analisa dukungan ganda nanti KPU akan menentukan apakah terdapat dukungan ganda internal dan eksternal setiap calonnya.

Setelah itu masih ada tahapan verifikasi faktual di lapangan, jika sudah memenuhi syarat sesuai dengan jumlah batas minimal, bakal calon baru bisa melakukan pendaftaran sebagai calon di KPU.

"Setelah diterima jumlah minimal syarat dukungan calon bukan berarti proses sudah selesai, masih ada tahapan verifikasi, perbaikan hingga pendaftaran calon," ungkapnya.



SASTRA LISAN "TANGGOMO" SAMPAIKAN PESAN PEMILU 2019

Sastra lisan *Tanggomo* yang merupakan budaya Gorontalo yang dipawakan dengan bahasa berirama, menjadi bagian penting pada pentas Pagelaran Seni dan Budaya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, dalam menghadapi Pemilu 2019.

KPU Provinsi Gorontalo lewat pagelaran Seni dan Budaya jelang satu tahun pelaksanaan Pemilu 2019, menyajikan musik dan budaya kearifan lokal, untuk mensosialisasikan Pemilu 2019.

"Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi KPU secara serentak se-Indonesia, dan kami di Gorontalo mengangkat tema kearifan lokal daerah," kata Maspa Mantulangi Divisi Sosialisasi.

Menurutnya, meski pagelaran seni dan budaya ini didesain secara modern, namun tidak menghilangkan unsur dan nilai budaya kearifan lokal daerah Gorontalo, dan juga tentu melestarikan budaya lokal Gorontalo.

Kegiatan dimaksud untuk menyampaikan pesan Pemilu 2019 melalui media budaya, sehingga bisa lebih diketahui masyarakat luas dari berbagai kalangan.

"Contohnya *Tanggomo*, yang pada zaman dahulu

menjadi media penyampaian informasi yang berhubungan dengan aktivitas masyarakat seperti pendidikan maupun kehidupan sosial di daerah, dan dianggap mampu mencuri perhatian warga," ujar Maspa Mantulangi.

Pada kegiatan tersebut selain sastra lisan *Tanggomo*, KPU Provinsi Gorontalo juga menyajikan Tarian Dana Dana, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) Kota Tengah, serta teatrikal yang menyampaikan pesan sosialisasi berisi Pemilu berintegritas.

Lewat kesempatan itu juga, KPU Provinsi Gorontalo mensosialisasikan 20 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2019, 4 Partai diantaranya merupakan partai lokal Aceh, dan ada 16 Partai Nasional.

Acara yang juga dihadiri oleh pengurus Parpol tingkat Provinsi Gorontalo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Tokoh Masyarakat, Budayawan dan kalangan mahasiswa.

Dalam kesempatan itu KPU Provinsi Gorontalo mengajak seluruh pihak untuk bersama berjanji bertekad mengukuhkan Pemilu 2019, menjadi pemilu berkualitas, berintegritas, bermartabat jauh dari isu sara, politik uang, kampanye hitam, hasutan dan ujaran kebencian.



ALUR / PROSES PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2019



KPU RI HIMPUN DATA LOGISTIK PERSIAPAN PEMILU 2019



Melalui Bimbingan Teknik (Bimtek) rencana kebutuhan anggaran dan logistik pemilu 2019 cilingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, Divisi biro logistik KPU RI sejak tanggal 6-7 Mei terus menghimpun kebutuhan casar logistik yang akan digunakan pada Pemilu 2019 mendatang.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo Selvi Katil selaku Divisi Keuangan, Umum dan Logistik menjelaskan bahwa, KPU RI telah menginstruksikan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia untuk membuat perencanaan dan estimasi kebutuhan logistik.

"Ini untuk lebih memastikan kebutuhan konkrit belanja yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan," kata Selvi Katil.

Ia berharap agar bagian logistik di KPU se-Provinsi Gorontalo untuk memperhatikan betul rencana kebutuhan dan anggaran, perhatikan jumlah pemilih cisetiap TPS.

Dalam penentuan jumlah kebutuhan logistik pemilu harus tetap memperhatikan azas responsif dan azas selektif.

"Selektif dalam menentukan jenis atau macamnya can responsif dalam menentukan jumlah atau besaran logistik yang dibutuhkan," tegas Selvi.

Sementara itu Andi Rosjadi, didampingi Arif Firmansyah dari sub bagian distribusi angkutan reguler Biro Logistik KPURI menjelaskan bahwa, pihaknya datang ke daerah untuk menghimpun data-data dari setiap satuan kerja yang ada di KPU se-Provinsi Gorontalo.

"Data ini nantinya sebagai kesiapan KPU RI, terkait perencanaan program anggaran tahun 2019, pada pemilu mendatang," kata Andi Rosjadi.

Nantinya disini ada satu proyek perubahan yang cukup nyata, yaitu dimana ada beberapa aspirasi yang akan diakomodir salah satunya pada saat proses bongkar muat logistik kedepan.

"Diantaranya terkait biaya bongkar muat, pengawalan pengamanan, dan biaya sewa gudang," ujarnya.

Terkait batas waktu pelaksanaan penghimpunan kebutuhan anggaran dan logistik ini, ia menjelaskan bahwa, sudah mulai terjun di 34 provinsi di Indonesia sejak bulan April hingga Mei ini.

"Batas waktu hingga akhir Mei 2018 sudah harus selesai, karena nantinya data ini akan diserahkan pada Agustus-September, setelah itu ke diserahkan Dirjen anggaran pada akhir Oktober 2018, karena diakhir tahun 2018 harus keluar dalam bentuk DIPA Anggaran tahun 2019," ungkapnya.

Ada dua proyek pekerjaan logistik Pemilu 2019 yang menjadi pekerjaan utama, untuk tahun 2018 ini yaitu kesiapan penerimaan kotak suara.

"Teman-teman di daerah harus sudah siap menerima kotak suara yang baru, yang model desainnya transparan," jelasnya.

Sesuai jadwal tahapan kalau tidak ada kendala akhir tahun ini sekitar Oktober-November daerah sudah menerima logistik kotak suara.

Kegiatan bimtek ini sendiri, diikuti oleh komisioner KPU Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota divisi logistik yang didampingi juga oleh sekretaris dan kepala sub bagian logistik KPU se-Provinsi Gorontalo.

SIAPA YANG BISA MENGGUNAKAN HAK PILIH??

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.



Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

1 Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin meskipun belum genap 17 tahun

2 Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

3 Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4 Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;

5 Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat

6 Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Catatan :

Bagi Pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter





Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPPP Pencalonan DPD RI Pemilu 2019 (3 April 2018)

Peserta Bakal Calon/LO Mengikuti Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SIPPP Pencalonan DPD RI Pemilu 2019 (3 April 2018)



Verifikasi Administrasi dan Analisa Dukungan Ganda Syarat Calon Anggota DPD Pemilu 2019 Mulai 27 April - 10 Mei 2018



Rakor Progres Hasil Coklit Data Pemilih dan Persiapan Pengoperasian Aplikasi SIDALIH Pemilu 2019 Diikuti KPU se-Provinsi Gorontalo



Foto Bersama Tim Penerima Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD Perwakilan Provinsi Gorontalo Mulai 22 - 26 April 2018



Bimtek Recana Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu 2019 Dilingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota Narasumber Sub Bagian Distribusi Angkutan Reguler Biro Logistik KPU RI



Pagelaran Seni dan Budaya Dalam Rangka Sosialisasi Pemilu 2019 (21 April 2018)

Bawaslu Provinsi Gorontalo Mengawasi Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Calon DPD (25 April 2018)



Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Analisis Dukungan Ganda dan Sebaran Calon DPD RI. (13 Mei 2018)



Peserta LO/Bakal Calon Anggota DPD RI Saat menerima Hasil Verifikasi Administrasi. (13 Mei 2018)

PERLU BENTUK FORUM KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

"Undang-undang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih"



Foto: Donald Raymond Wahani

Verrianto Madjowa

Validasi daftar pemilih pada setiap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi bagian terpenting sukses penyelenggaraan pemilihan, dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa menjamin hak pilih dari setiap orang, yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo Verrianto Madjowa selaku Divisi Perencanaan dan Data menjelaskan bahwa, perlu adanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan.

Terkait dengan validitas data pemilih berkelanjutan di Provinsi Gorontalo, Verrianto Madjowa berharap agar segera dibentuk "Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih" di setiap tingkatan, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

"Lewat forum itu semua persoalan mengenai kependudukan dapat dibahas, seperti penduduk yang telah meninggal dunia dan ainya, apakah model pertemuannya dilakukan setiap tiga atau enam bulan, silahkan disepakat saja, terutama jelang pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang," kata Verrianto Madjowa.

Ia menambahkan ada sejumlah pihak yang dapat dilibatkan didalam forum tersebut diantaranya selain dari unsur KPU, Bawaslu, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, juga ada TNI-Polri, pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) serta Dinas Pendidikan.

"Kenapa ada Polri dan TNI, karena menyangkut data personal anggota yang akan masuk persiun sebelum tanggal 17 April 2019, sementara data tersebut tersebut hanya ada pada lembaga mereka, agar hak pilih mereka bisa terakomodir," terangnya.

Terkait pemilih yang ada di Lapas, terkadang KTP mereka susah didapati, sehingga lewat forum komunikasi tersebut, KPU bisa mengetahui lebih awal berapa penghuni lapas yang punya hak pilih.

Setelah Pemilu 2019 tahun depan, KPU akan terus melakukan pemutakhiran berkelanjutan.

Anggota KPU Provinsi Gorontalo
Periode 2008-2013 & 2013-2018

INDEPENDEIN DAN SALING MENGHARGAI

Siapa pun dia yang bekerja pada lembaga penyelenggara Pemilu, mulai tingkat pusat hingga ke desa/kelurahan bahkan hingga ke TPS, diluntut harus independen.

"Penyelenggara harus independen, profesional, transparan dan terpenting adalah berintegritas, khususnya bagi komisioner KPU," kata Selvi Katili, yang sudah 10 tahun berkiprah di lembaga penyelenggara Pemilu.

Selvi Katili sendiri sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai komisioner KPU di Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun periode 2008-2013. Karena pengalamannya dan integritas yang ia miliki, Selvi kemudian dipercayakan menjadi anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Keuangan dan Logistik, periode 2013-2018.

Disemua tahapan penyelenggaraan Pemilu, integritas adalah harga mati yang wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh setiap komisioner yang berkecimpung pada lembaga yang dituntut untuk independen.

Hal terpenting lainnya yang harus diperhatikan oleh komisioner KPU, selain integritas tinggi, adalah sikap saling menghargai antar sesama anggota.

"Sebagai manusia kita punya pemikiran, prinsip dan cara pandang yang berbeda, sehingga tak jarang juga terjadi perbedaan pendapat antara komisioner dalam hal pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan," ujar Selvi Katili.

Untuk bisa menjaga kekompakan dan keharmonisan itu, selain bentuk komunikasi yang baik, juga antar satu dengan lainnya harus bisa saling menghargai, terutama dalam hal sudut pandang atau pendapat terhadap suatu permasalahan.

Ia menambahkan bahwa, di dalam pengambilan keputusan meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam setiap pleno akan tetapi ketika sudah ada keputusan yang dihasilkan maka kelanjutannya sudah harus satu keputusan bersama yang menjadi keputusan lembaga, meskipun di dalamnya ada perbedaan pendapat.

"Saya lebih menonjolkan sikap kekeluargaan dan komunikasi yang baik," ujar Selvi.

Selvi Katili

Anggota KPU Provinsi Gorontalo
Periode 2013-2018

"Setiap komisioner KPU punya hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan dan itu diatur didalam undang-undang"



TERPENTING ADALAH INTEGRITAS DAN TRANSPARANSI

Catatan Akhir Jabatan

Periode 2003-2008, 2008-2013 & 2013-2018

"Semakin transparannya sebuah lembaga maka kepercayaan publik pasti tumbuh, kalau kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPU tinggi maka partisipasi pemilih dengan sendirinya akan meningkat," Kata Ahmad Abdullah.

Karena terkadang pemilih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau "Golput" karena mungkin mereka merasa suara mereka tidak dihargai, ini sangat berkaitan.

Ini menjadi hal utama bagi penyelenggara pemilu, tidak hanya komisioner KPU tapi juga staf sekretariat serta penyelenggara tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa.

"Pertahankan integritas dan taat kepada asas penyelenggara Pemilu yaitu jujur dan adil," tegasnya.

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir ini KPU terus membangun sistem bagaimana Pemilu itu dipercaya, salah satu cara yaitu transparan semua prosesnya.

Dari semua proses tahapan Pemilu/Pemilukada, sudah berbasis aplikasi, tentu bisa diakses oleh semua pihak contohnya, pada tahapan pencalonan ada SILON (Sistem Informasi Percalonan), data pemilih ada SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), Partai Politik ada SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik), Logistik ada SILOG (Sistem Informasi Logistik), perhitungan suara ada SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara), keuangan dan juga kepegawaian.

"Semakin ke sini, dengan dibukanya berbagai sistem yang transparan ini, menjadikan orang harus taat terhadap hal itu," jelasnya.

Sekarang ini saat penghitungan suara di TPS, langsung direkam dan dikirim ke KPU RI, melalui aplikasi, sehingga bisa langsung diketahui publik dihari yang sama, dulunya tidak demikian.

Bagi penyelenggara pemilu berikutnya, ia berharap segala yang baik dan prestasi yang telah diraih oleh KPU Provinsi Gorontalo dipertahankan kalau perlu ditingkatkan lagi.

"Dari tahun ke tahun, infrastruktur serta sarana prasarana KPU sudah semakin baik, kalau perlu ditingkatkan lagi," harapnya.

SOLID

Hal terpenting lainnya menurut Ahmad Abdullah adalah kesolidan antar komisioner, karena di KPU itu kolektif kolegial, termasuk juga dengan sekretariat.

KPU bukan lembaga yang ada kepalanya, ketua memang dipilih anggota, tapi apa yang diputuskan oleh ketua tidak mutlak menjadi keputusan, akan tetapi keputusan yang dikeluarkan adalah keputusan yang diambil secara bersama-sama sehingga menjadi keputusan lembaga.

Ia berharap komisioner yang baru ini mampu menjaga kekompakan. Memang didalam tugas dan tanggungjawab, setiap komisioner sudah dibagi beberapa divisi.

"Divisi adalah garis tanggung-jawab, atau peran yang harus dijalankan setiap komisioner," urainya. Namun dalam hal pengambilan keputusan, semuanya dikeluarkan lewat "Pleno". Sehingga apapun yang dihasilkan didalam pleno KPU, itu menjadi keputusan lembaga dan harus dijaga.

Begitu juga dengan pegawai di sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, ia menilai kekompakan, kebersamaan yang terjalin selama ini agar terus dijaga.

"Merdeka yang ditempatkan di sekretariat KPU, adalah orang yang benar-benar profesional dalam bidangnya," tegas Ahmad, yang sudah 14 tahun menjabat sebagai komisioner KPU.

Menurutnya bahwa, sejauh ini SDM yang ada di sekretariat KPU sudah sangat bagus, mereka paham dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing meskipun terkadang regulasi itu berubah-ubah.

Namun kedepan perlu penguatan kapasitas, karena mereka yang akan lebih berperan, komisioner KPU bisa berganti kapan saja paling lama 10 tahun, tetapi mereka sekretariat yang mungkin akan bertahan lebih lama.

Di KPU banyak suka dukanya, ia sendiri masuk menjabat sebagai anggota KPU pada tahun 2003, dimana waktu itu belum memiliki bangunan permanen, harus berpindah-pindah kontrakan, namun dari tahun ke tahun, kredibilitas lembaga terus meningkat, dan mendapat kepercayaan publik yang besar.

Harapannya, pertama adalah bangun kesolidan, kalau KPU tidak solid pasti akan bisa diguncang oleh kekuatan lain.

Kedua, taat asas, harus pahami betul tupoksi bahwa kita di daerah hanya penyelenggara ditingkat daerah yang sebenarnya lebih pada eksekusi dari regulasi, dimana KPU di daerah hanya melaksanakan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KPU pusat.

"Jadi jangan melakukan hal-hal yang bukan kewenangan kita, misalnya ada aturan yang tidak jelas, itu jangan melakukan penafsiran sendiri, kewenangan itu ada di KPU RI," pintanya.

Bangunlah komunikasi yang baik dengan semua pihak, baik itu dengan pemerintah daerah, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk media, tanpa mereka, tentu program KPU tidak akan berjalan.

Untuk komunikasi dengan partai politik ada prosedurnya, arti dari "KPU melayani" harus dipahami betul.

Bagi mereka yang akan terpilih segeralah menyesuaikan diri, karena tahapan Pemilu 2019 telah berjalan.

Ahmad Abdullah

KOMUNIKASI SANTUN DAN JANGAN MEMAKSA KEHENDAK

Catatan Akhir Jabatan Periode 2003-2008 & 2013-2018



Maspa Mantulangi

Anggota KPU Maspa Mantulangi yang sudah memulai karirnya sebagai penyelenggara Pemilu sejak tahun 2003 itu, berpendapat bahwa, untuk menjaga kekompakan serta keharmonisan antara sesama komisioner serta pegawai di sekretariat KPU, terpenting adalah menalin komunikasi yang santun dan jangan memaksakan kehendak sendiri. Tanggal 24 Mei 2018 merupakan hari terakhir baginya melaksanakan tugas sebagai komisiner KPU Provinsi Gorontalo periode 2013-2018.

Ada beberapa hal yang menjadi pesan darinya untuk komisioner yang baru yang akan bertugas pada periode selanjutnya.

"Dalam menjaga keharmonisan dengan semua pihak, yang perlu saya tekankan adalah komunikasi santun dan tidak memaksakan kehendak," ujar Maspa Mantulangi wanita kelahiran tahun 1977.

Menurutnya bahwa, jika komunikasi kita baik, tentu kerjasama dengan semua pihak baik itu pemerintah daerah, peserta pemilu partai politik, masyarakat, lembaga pengawas tentu akan bagus pula.

Apa yang telah ia dan rekan-rekan lainnya raih selama ini, adalah buah dari hasil komunikasi sehingga terjalin kerjasama yang baik. Kedepan menurutnya, hal-hal yang baik tentu dapat dipertahankan kalau perlu ditingkatkan lagi, sehingga lembaga KPU terus mendapat kepercayaan publik terutama masyarakat Gorontalo.

INTERNAL

Diinternal KPU sendiri, menurutnya tidak sedikit dijumpai persoalan antara kesekretariatan dengan komisioner, dan ini tidak hanya terjadi di Gorontalo. Sementara kita tahu bersama bahwa, peran sekretariat sangatlah penting menunjang suksesnya setiap pelaksanaan Pemilu/kada atau Pemilu.

"Tugas kami sudah dibagi sesuai divisi masing-masing, begitu juga dengan mereka, sehingga itu kerjakan apa yang menjadi tugas sendiri, dan mereka tentu akan mengerjakan apa yang selayaknya mereka kerjakan, karena secara administrasi mereka punya SOP yang mengatur semua itu," jelasnya.

Karena mereka orang pemerintahan tentu ada aturan administrasi yang mengatur semua itu, sementara komisioner terlepas dari semua kalangan.

Ketika ada program dalam pelaksanaan tahapan Pilkada/Pemilu ingin dilaksanakan seperti apa keinginan kita, itu dikomunikasikan dengan baik, apakah suatu kegiatan itu bisa dilaksanakan atau tidak, kalau menurut mereka hal itu tidak boleh dilaksanakan dan tidak ada hal yang membolehkan itu, maka jangan dipaksakan.

Karena keberhasilan suatu kegiatan itu terlahir bukan dari keterpaksaan, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan pekerjaan itu sesuai dengan SOP.

"Misalnya saya punya konsep, apakah hal itu bisa ditopang dengan dukungan dari sekretariat terutama dari segi operasionalnya, kalau dipaksakan tentu akan berakibat tidak baik di dalam sekretariat," urainya.

Menurutnya, sejauh ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di KPU Provinsi Gorontalo mereka sudah sangat bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan selama ini, mereka profesional dibidang masing-masing.

"Saya membangun komunikasi dengan sekretariat, sudah lebih dari sekedar teman atau keluarga, ada saatnya kita harus bertindak sebagai pimpinan, ada saatnya sebagai seorang teman, dan ada saatnya kita bekerjasama saling mendukung dalam sebuah pekerjaan," jelas Maspa Mantulangi, yang sempat menjabat sebagai Pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Gorontalo.

EKSTERNAL

Cara yang sudah diterapkan di internal lembaga, sepatutnya juga diterapkan di luar lembaga, karena bagaimanapun juga penyelenggara Pemilu/Pilkada tidak hanya KPU, tapi ada juga Bawaslu serta penyelenggara Ad-hoc di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga di TPS.

"Jaga cara kita berkomunikasi dengan pihak lain, misalnya dengan Bawaslu meskipun secara tupoksi mereka bersifat pengawasan, tapi kita perlu menjaga etika dan pola komunikasi yang baik, saling membantu dan menopang satu sama lain meskipun dalam tugas yang berbeda," tegasnya.

Bicara soal sosialisasi pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Maspa Mantulangi yang pada periode ini membidangi Divisi SDM, Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi menilai bahwa, PPK dan PPS merupakan bagian terpenting suksesnya serta meningkatnya partisipasi publik terhadap Pemilu.

Dengan tugas yang semakin berat, tentu membutuhkan tanggungjawab yang besar, serta keikhlasan dalam melaksanakan tugas.

"Rangkul dan bimbing mereka, meski penyelenggara Ad-Hoc mereka juga dibatasi hanya bisa dua kali periode bertugas sebagai penyelenggara, sehingga pelatihan berkaitan kepemiluan adalah hal yang harus mereka kuasai," harapnya.

Dalam hal memberikan sosialisasi ke masyarakat disuatu daerah, ia lebih suka menggunakan pendekatan dengan melihat karakteristik masyarakat disekitarnya, misalnya mereka lebih suka mendengarkan sosialisasi menggunakan bahasa daerah Gorontalo, maka kita pun harus menggunakan bahasa daerah.

Begitu juga dalam menghadapi pemilih pemula terutama kalangan mahasiswa, gunakan bahasa yang mudah dimengerti.

"Karena membangkitkan kesadaran pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih tidaklah mudah, akan sangat mudah jika kita memahami cara berkomunikasi," ungkapnya.

KESAN

"Yang paling berkesan menurut saya adalah bukan masalah yang kami hadapi, tapi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, adu argumen, tapi memiliki tujuan yang sama, yang pada akhirnya berpegang teguh pada hasil "kesepakatan," ujarnya.

Menurutnya, dalam menyelesaikan masalah di KPU seperti menyelesaikan masalah di rumah tangga, boleh beda pendapat, akan tetapi ketika sudah ada kesepakatan bersama maka itu yang menjadi pegangan.

"Didalam rumah tangga apapun masalahnya tentu ada jalan keluar, seperti itulah kita manage persoalan yang akan dihadapi nanti," ungkapnya.

Ia bersyukur didalam penyelesaian masalah tidak pernah cekcok, kalau pun ada kesalahpahaman itu diselesaikan secara internal, dan tidak pernah sampai keluar, apalagi sampai harus mendzholimi orang lain.

Lembaga KPU ini bukar milik berlima tapi secara keseluruhan atas nama KPU mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat.

"Kebersamaan kami selama lima tahun tidak akan memutuskan silaturahmi sampai kapanpun, begitu juga dengan komisioner sebelum periode kami," tegasnya.

Ketika harus memilih manakah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, apakah masalah keluarga atau masalah yang ada di KPU? Maspa menjelaskan bahwa, kedua-duanya adalah penting. Namun yang perlu cidahulukan adalah masalah yang dihadapi di KPU. Mengingat: didalam penyelesaian masalah itu ada kepentingan umat, kepentingan publik.

Kenapa demikian? karena permasalahan di keluarga tidak ada batas waktu, sementara di dalam KPU ketika ada persoalan atau hal yang perlu dibahas, bahkan tengah malam sekalipun harus datang ke kantor KPU untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau di rumah tangga mungkin ada istilah "tunggu sebentar" tapi di KPU ketika ada persoalan, suka tidak suka, harus diselesaikan saat itu juga, karena ada regulasi/batas waktu yang mengatur itu," tegas Maspa Mantulangi.

Jadi pada intinya, jauh lebih besar tanggungjawab ke masyarakat daripada diri kita sendiri atau keluarga.

Bagi komisioner yang baru meskipun ada yang sudah punya pengalaman tentang kepemiluan, banyaklah bertanya dan mencari tahu hal-hal yang belum dipahami.

“Regulasi Jangan Ditasirkan Sendiri”

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI CALON PERSEORANGAN
JUMLAH DUKUNGAN BAKAL ANGGOTA DPD RI PEMILU 2019
DAERAH PEMILIHAN GORONTALO

| NO | NAMA | SEBAKAN KAB/KOTA | JUMLAH DUKUNGAN | MS | TMS | STATUS |
|----|-----------------------|---------------------|--------------------|-------|-----|--------|
| 1 | A.D. Khaly | 4 | 3.210 | 2.891 | 319 | MS |
| 2 | Abdul Manan Podungge | 3 | 1.162 | 816 | 346 | BMS |
| 3 | Abdurrahman A. Bahmid | 6 | 2.225 | 1.961 | 264 | MS |
| 4 | Ali Sucipto Sidiki | 6 | 2.334 | 1.923 | 411 | MS |
| 5 | Ardjun Mogulaingo | 5 | 1.855 | 1.560 | 295 | MS |
| 6 | Asrin Mosli | 5 | 1.589 | 1.402 | 187 | MS |
| 7 | Burhan Mantulang | 6 | 1.185 | 1.126 | 59 | MS |
| 8 | Conny Gabel | 5 | 3.489 | 2.668 | 821 | MS |
| 9 | Dewi Sartika Hometo | 6 | 2.067 | 1.834 | 233 | MS |
| 10 | Eily Mopangga | 5 | 1.477 | 1.319 | 158 | MS |
| 11 | Ethon Parman | 5 | 1.590 | 1.336 | 254 | MS |
| 12 | Fadel Muhammad | 8 | 5.746 | 5.023 | 723 | MS |
| 13 | Iman Maanahya | 6 | 1.574 | 1.303 | 271 | MS |
| 14 | Inrawanto Hasan | 6 | 1.251 | 991 | 260 | BMS |
| 15 | Ishak Kadili | 5 | 1.149 | 981 | 168 | BMS |
| 16 | Ishak Liputo | 6 | 3.297 | 2.649 | 648 | MS |
| 17 | Iskandarsyah Datau | 4 | 1.490 | 1.292 | 198 | MS |
| 18 | Jamaludin Mowwago | 4 | 1.811 | 1.730 | 81 | MS |
| 19 | Lahmudin Laparaga | 5 | 2.429 | 1.095 | 434 | MS |
| 20 | Mirrawati Modanggu | 6 | 1.820 | 1.543 | 277 | MS |
| 21 | Moch. Dahlan Usman | 6 | 2.349 | 1.975 | 474 | MS |
| 22 | M. Iqbal Makmur | 4 | 1.383 | 946 | 437 | BMS |
| 23 | Muchtar Adam | 4 | 1.151 | 872 | 279 | BMS |
| 24 | Muh. N. Tuli | 5 | 2.122 | 1.755 | 367 | MS |
| 25 | Nikla Tulen | 6 | 1.774 | 1.355 | 419 | MS |
| 26 | Nuraini Podungge | 6 | 1.158 | 941 | 217 | BMS |
| 27 | Oktalina Pikoli | 6 | 1.217 | 1.083 | 134 | MS |
| 28 | Rahmatullah Jahja | 6 | 5.378 | 4.714 | 664 | MS |
| 29 | Ramli Kasim | 5 | 1.266 | 931 | 335 | BMS |
| 30 | Risal Falsal Pou | 3 | 1.009 | 742 | 267 | BMS |
| 31 | Satya Alvino Bya | 6 | 3.139 | 2.424 | 715 | MS |
| 32 | Sri Hantuti Paramata | 8 | 2.930 | 2.638 | 292 | MS |
| 33 | Su marni Gari | 6 | 1.600 | 1.406 | 194 | MS |
| 34 | Syarifudin Mosliu | 4 | 2.288 | 1.863 | 425 | MS |
| 35 | Weni Uputo | 6 | 3.514 | 3.253 | 261 | MS |



TELITI DAN MANDIRI

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo Drs. Ardin Daxial, M.Ec.Dev menuturkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di kantor sekretariat KPU Provinsi Gorontalo, dituntut untuk terus bisa mandiri dan teliti.

"Ketelitian dan kemandirian menjadi utama yang terus ditanamkan kepada setiap SDM yang ada di sekretariat KPU," kata Drs. Ardin Daxial, M.Ec.Dev.

Kenapa harus teliti, Ardin menjelaskan bahwa, mereka melayani, memeriksa dan meneliti berkas dokumen yang menjadi persyaratan bagi peserta Pemilu atau Pemilukada.

Contohnya pada tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD RI pada 22 -26 April 2018 baru-baru ini, dimana ada ribuan KTP bakal calon yang telah dimasukan dan harus diperiksa dan diteliti satu persatu oleh mereka.

"Kerapa, karena ini menyangkut hak mereka untuk dipilih dan memilih yang telah diatur didalam undang-undang," ujarnya.

Mandiri, karena mereka bekerja sebagaimana program, jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada yang berlangsung.

Sehingganya tak jarang dari mereka, yang harus dituntut untuk terus berada di kantor hingga tengah malam, karena regulasi Peraturan KPU (PKPU) yang mewajibkan semua itu.

"Contohnya pada tahapan pencalonan atau pendaftaran, yang batas pelaksanaannya hingga pukul 24.00, secara otomatis pelayanan tetap harus berjalan," urainya.

Selain kemandirian dan ketelitian, SDM di sekretariat KPU juga terus diberikan pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas, seiring pelaksanaan tahapan yang tengah berjalan saat ini.

Drs. Ardin Daxial, M.Ec.Dev

(Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo)





KENALI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>NOMOR URUT</p> <p>1</p> <p>PKB PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>2</p> <p>GERINDRA PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>3</p> <p>PDI PERJUANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>4</p> <p>PARTAI GOLONGAN KARYA</p> |
| <p>NOMOR URUT</p> <p>5</p> <p>Partai NasDem PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>6</p> <p>PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>7</p> <p>PARTAI BERKARYA</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>8</p> <p>PKS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</p> |
| <p>NOMOR URUT</p> <p>9</p> <p>PARTAI PERINDO PARTAI PERSATUAN INDONESIA</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>10</p> <p>PPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>11</p> <p>PSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>12</p> <p>PAN PARTAI AMANAT NASIONAL</p> |
| <p>NOMOR URUT</p> <p>13</p> <p>HANURA PARTAI HATI NURANI RAKYAT</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>14</p> <p>PARTAI DEMOKRAT</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>19</p> <p>PARTAI BULAN BINTANG</p> | <p>NOMOR URUT</p> <p>20</p> <p>PKP INDONESIA PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA</p> |

**PEMILIH BERDAULAT
NEGARA KUAT**



KPU
Melayani
www.pemilihan.kpu.go.id

Gerakan Sadar PEMILU